BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bantuan Kemanusiaan Uni Eropa kepada Indonesia

Dalam usahanya untuk menetapkan peranan UE di dunia, selain melalui jalur diplomatik yang dibangun dengan negara-negara di dunia atau kerjasama dalam berbagai forum seperti *Asia-Europe Meeting* (ASEM) dan *Euro-Mediterranean Partnership* (EMP), UE menjadikan kerjasama pembangunan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang tercantum dalam *Treaty of Rome* (perjanjian mengenai pembentukan UE, yang pada saat itu disebut Masyarakat Eropa), meskipun tidak menyebutkan tentang kerjasama pembangunan, namun pemikiran untuk membantu negara-negara di luar cakupan UE tercantum dalam *preamble* perjanjian tersebut. Dikatakan bahwa "*The six, intending to confirm the solidarity which binds europe and overseas countries are desiring to ensure development of their prosperity*" (Nicoll&Salmon, 2001: 86).

Kemudian setelah pemberlakuan Perjanjian Maastricht pada Bulan November 1993 yang antara lain merupakan respon terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan internasional pasca berakhirnya perang dingin pada tahun 90-an, kerjasama pembangunan disebutkan secara eksplisit dimana bantuan merupakan instrumen utama dari kebijakan kerjasama tersebut baik berupa bantuan pinjaman ataupun bantuan kemanusiaan yang berupa hibah.

Kebijakan bantuan UE terhadap Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1976. Fokus bantuan pada saat itu adalah untuk pembangunan pedesaan. Namun pada

tahun 1992, fokus bantuan tersebut beralih pada isu lingkungan, seperti kehutanan dan penyediaan air bersih. Seiring dengan jatuhnyaa rejim orde baru, sejak tahun 2000, bantuan UE terfokus pada *good government* dan demokratisasi, *natural resources management*, dan membentuk sektor perekonomian Indonesia.

Bantuan yang diberikan oleh UE terhadap Indonesia mencakup dua kerangka. Yang pertama adalah kerangka bantuan kemanusiaan dan kedua adalah kerangka *development cooperation*. Dalam kerangka bantuan kemanusiaan, UE meberikan bantuannya melalui ECHO, sebuah lembaga di bawah naungan Komisi Eropa yang bersifat independen. Lembaga yang didirikan pada tahun 1992 ini merupakan lembaga terkemuka di dunia yang memberikan bantuan dalam bidang lingkungan, membantu kegiatan pencegahan dan *training* dalam rangka penanganan dampak lingkungan serta bidang-bidang kemanusiaan lainnya.

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, UE melalui ECHO telah meningkatkan bantuannya kepada Indonesia. Dalam periode 1997-1999, ECHO telah memberikan bantuan sebanyak $7.175.240 dalam berbagai proyek kemanusiaan, seperti proyek penanggulangan kebakaran, sanitasi, kesehatan yang diberikan untuk daerah Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka penanganan konflik etnis dan agama di Maluku, ECHO telah membantu masyarakat Maluku dengan memberikan bantuan obat-obatan, makanan, membangun tenda dan dapur umum serta bantuan pengadaan air bersih. Di Timor Timur (sekarang Timor Leste), UE bekerjasama dengan UNHCR memberikan bantuan dalam penanganan pengungsi sekitar 250.000 jiwa dari Timor Timur ke Nusa Tenggara Timur (www.ec.europa.eu/echo).

Begitupun ketika Aceh mengalami konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia dimana UE turut ambil bagian dengan membantu proses perdamaian di sana dan membentuk *Aceh Monitoring Mission* untuk upaya pemantauan setelah penandatanganan MoU perdamaian antara GAM dengan Indonesia di Helsinki. Kemudian ketika bencana gempa bumi dan tsunami melanda Aceh dan Sumatera Utara, dimana bencana tersebut mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa serta kerusakan yang parah di berbagai sektor kehidupan. UE merupakan salah satu pihak yang paling serius dalam membantu upaya pemulihan melalui rekonstruksi infrastruktur di Aceh dan Sumatera Utara.

4.2 Upaya Uni Eropa dalam Membantu Proses Pemulihan Aceh Pasca Bencana Alam Tsunami

Komisi Eropa adalah donor besar pertama yang memberikan bantuan penanganan bencana tsunami di Aceh. Pada hari terjadinya tsunami, sebesar 3 juta Euro dialokasikan untuk tindakan penyelamatan awal, termasuk tempat tinggal darurat, selimut, pasokan makanan darurat dan air serta bantuan medis.

Selanjutnya, dana sebesar 60 juta Euro telah digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan sebagai upaya tanggap darurat yang diantaranya adalah sistem peringatan dini epidemik, layanan kesehatan dasar dan bantuan psikososial, penelusuran dan penyatuan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya, fasilitas air bersih dan sanitasi, peningkatan kondisi kehidupan penduduk yang tinggal di pusat-pusat penampungan pengungsi, pemulihan kembali kegiatan nelayan serta layanan telfon satelit.

Sementara bantuan kemanusiaannya terus berlanjut, Komisi Eropa juga memberikan bantuan untuk memastikan pemulihan jangka panjang yang berkesinambungan. Dana sebesar 7 juta Euro melalui *Rapid Reaction Mechanism* (RRM) telah dikeluarkan oleh Komisi Eropa. RRM memberikan dukungan untuk membuat landasan rekonstruksi jangka panjang. RRM mencakup kontribusi awal Komisi Eropa untuk MDTFANS dan sebuah program jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan bantuan pasca tsunami. Proyek lain yang dibiayai oleh RRM antara lain adalah konsultasi tepat waktu dengan masyarakat Aceh tentang rencana-rencana rekonstruksi pemerintah (www.delidn.ec.europa/brochures/htm).

Selain itu, pada tanggal 3 Oktober 2005, Komisi Eropa secara resmi membuka Rumah Eropa di Banda Aceh. Rumah Eropa merupakan wadah untuk peningkatan koordinasi dan memastikan pelaksanaan yang efisien atas proyek-proyek rekonstruksi di Aceh yang didanai oleh UE. Rumah Eropa juga bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi diantara negara-negara donor yang tergabung dalam MDTFANS dalam kegiatan-kegiatan rekonstruksi dan meningkatkan dialog kebijakan dengan masyarakat setempat dan pihak yang berwenang di lapangan. Rumah Eropa dikelola oleh sebuah tim teknis yang dipimpin oleh seorang kepala kantor. Kegiatan dari rumah ini diawasi oleh Delegasi Komisi Eropa di Jakarta. Di Aceh, ECHO melaksanakan kegiatan operasinya dari Rumah Eropa dan memantau secara ketat proyek-proyek kemanusiaannya dan memberi evaluasi atas situasi kemanusiaan di Aceh.

4.2.1 Bantuan Rekonstruksi melalui Kerangka MDTFANS

Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera (MDTFANS), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk *World Bank* dan negara-negara donor termasuk Uni Eropa atas permintaan Pemerintah Indonesia. MDTFANS itu sendiri diketuai bersama oleh Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), Bank Dunia sebagai wali amanat dan Komisi Eropa sebagai pendonor terbesar. Lembaga ini menjalin koordinasi dengan badan-badan di bawah PBB dan donor-donor bilateral lainnya serta bertanggung jawab dalam memutuskan dan menentukan program dan proyek apa saja yang direncanakan dalam upaya rekonstruksi di Aceh.

Setiap ketua dari MDTFANS memiliki tanggung jawab khusus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Uni Eropa memiliki tanggung jawab tersendiri untuk :

- Bersama-sama dengan anggota-anggota *steering committee* khususnya dengan negara donor lainnya untuk memastikan bahwa semangat kerjasama dan membangun tetap dijunjung tinggi.
- Menjalin hubungan dengan donor-donor bilateral yang besar, ADB dan PBB, untuk membantu memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan aspirasi yang mereka berikan telah dijalankan oleh MDTFANS.
- Mengkoordinasikan kebijakan dialog *steering committee* dengan Pemerintah Indonesia terkait beberapa isu khusus.

- Berinteraksi dengan pemerintahan tertinggi untuk menetapkan fokus dari kebijakan atas nama para donor.

Hingga tahun 2008, MDTFANS memiliki dana yang berjumlah sekitar 700 juta Dollar Amerika yang 85% diantaranya didanai oleh UE (Komisi Eropa dan negara-negara anggota UE). Sejak Bulan November 2006, MDTFANS telah mengembangkan suatu portofolio yang cukup besar yang terdiri dari 17 proyek atau program untuk rekonstruksi di Aceh yang memobilisasikan dana sebesar US$ 482 juta. Portofolio tersebut memberikan bantuan yang diperlukan untuk empat sektor yang terdiri dari beberapa proyek dalam upaya rekonstruksi di Aceh. Keempat sektor tersebut adalah pemulihan kemasyarakatan, pemulihan infrastruktur skala besar dan transportasi, pembangunan kembali tata kelola serta pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan (www.multidonorfund.org/documents/MDF).

Pendanaan untuk rekonstruksi terhadap keempat sektor tersebut diberikan secara periodik setiap tahunnya untuk program atau proyek pada masing-masing sektor sampai dengan berakhirnya pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan dalam portofolio. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Data Proyek MDTFANS serta Pembiayaannya dalam Upaya Rekonstruksi Aceh
(dalam juta dollar AS)

Proyek	Rentang waktu					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pemulihan Kemasyarakatan						
Proyek Rekonstruksi Adm. Pertanahan Aceh	3.00	4.00	4.70	8.50	-	-
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masy. dan Pemukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK)	20.90	57.26	6.84	-	-	-
Pemulihan Infrastruktur Skala Besar&Transportasi						
Proyek Pengangkutan Laut dan Logistik	14.82	9.88	-	-	-	-
Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh	-	4.50	-	-	-	-
Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur	-	-	10.00	20.00	40.00	30.00
Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang	-	-	1.50	-	-	-
Pembangunan Kembali Tata Kelola						
Bantuan Teknis bagi BRR	11.00	3.74	7.84	-	-	-
Proyek Rekonstruksi Berbasis Sumberdaya Lokal	20.90	57.26	6.84	-	-	-
Pengelolaan Lingkungan yang Berkesinambungan						
Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup	-	2.00	3.58	3.00	6.00	2.95

Sumber: www.multidonorfund.org (diakses 23 Oktober 2008)
Ket : data telah diolah oleh peneliti

4.2.1.1 Pemulihan Kemasyarakatan

1. Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan Aceh

Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan Aceh dilaksanakan untuk mengidentifikasi kepemilikan tanah dan menerbitkan sertifikat tanah melalui pendataan tanah masyarakat, pemulihan data pertanahan, dan pembentukan sebuah pangkalan data tanah. Dalam kurun waktu tiga tahun, diperkirakan 600.000 pemilik tanah di Aceh akan menerima sertifikat tanah yang resmi sebagai fondasi yang kuat bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan. Status kepemilikan tanah akan dipulihkan melalui beberapa tahapan proses. Dengan fasilitas yang diberikan oleh NGO atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat akan melaksanakan sebuah proses pendataan tanah yang merupakan langkah awal bagi mereka untuk

memberdayakan kembali komunitasnya. Ini dilakukan sesuai dengan petunjuk dari BPN.

Selanjutnya, BPN akan memutuskan hasilnya dengan melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah dan melaksanakan validasi terhadap kesepakatan masyarakat atas kepemilikan dan batasan tanah. Hasil-hasil tersebut juga diperiksa melalui perbandingan dengan dokumentasi pra-tsunami. Pada akhirnya, BPN akan mengumumkan hasil keputusannya tersebut selama empat minggu, dilanjutkan dengan pendaftaran dan penerbitan sertifikat kepemilikan tanah. Semua jasa layanan ini tidak akan pungut biaya. Proyek juga membentuk suatu pangkalan data administrasi tanah yang canggih untuk mengantisipasi masalah dokumentasi di masa mendatang karena tsunami.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK)

Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pemukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) menyediakan hibah bagi 125 komunitas untuk membangun kembali dan memperbaiki perumahan dan merehabilitasi infrastruktur pemukimannya melalu pendekatan berbasis komunitas.

Berkembang melalui struktur pembangunan berbasis komunitas, masyarakat bersama-sama melakukan pemetaan dan penilaian kerusakan untuk menetapkan kebutuhan konstruksi dan mengidentifikasi pihak yang berhak. Proyek ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan pemukiman di 125 komunitas. Para penerima hibah akan membangun kembali sekitar 5000

rumah dan memperbaiki sekitar 8000 rumah. Proyek ini juga menyediakan hibah rekonstruksi yang akan membantu pemulihan infrastruktur yang bersifat tertier. Fasilitator pemukiman akan memastikan bahwa kualitas pekerjaan tersebut sesuai dengan standar.

Pendekatan berbasis komunitas ini telah terbukti efisien dalam membangun kembali perumahan dalam rentang waktu beberapa bulan dan menciptakan rasa kepemilikan yang kuat oleh para penerima manfaat serta rasa bangga terhadap apa yang telah dicapainya.

4.2.1.2 Pemulihan Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi

1. Proyek Pengangkutan Laut dan Logistik

Proyek ini menyediakan layanan pengangkutan dan dukungan logistik bagi seluruh badan rekonstruksi di Aceh melalui pendirian suatu layanan pengangkutan laut di sepanjang pantai utara dan barat Aceh serta kepulauan Simeulue.

Proyek pengangkutan laut dan logistik ini melakukan upaya-upaya perbaikan darurat untuk sejumlah pelabuhan dan peralatan berat yang tertentu untuk meningkatkan kemudahan akses berlabuh bagi kapal-kapal yang lebih besar. Dengan operasi semacam ini di sepanjang pantai Aceh dan Simeulue, proyek ini memungkinkan transportasi ke berbagai tujuan yang sebelumnya sulit dijangkau.

2. Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh

Proyek Pencegahan Banjir bagi kota Banda Aceh akan melindungi

komunitas masyarakat Banda Aceh yang paling rentan terhadap banjir melalui pemasangan lebih dari 100 katup pengendali banjir dan perbaikan tiga stasiun pompa di berbagai area yang rawan banjir karena hujan dan banjir karena luapan air sungai dan gelombang pasang.

Hancurnya gerbang banjir dan stasiun pompa telah mengakibatkan banjir periodik di wilayah-wilayah dataran rendah di Banda Aceh. Tanpa perlindungan banjir, prasarana publik dan swasta yang telah selesai direkonstruksi menjadi rentan terhadap kerusakan baru. Proyek ini mengatasi permasalahan tersebut dengan pemasangan katup banjir dari karet, pengembalian fungsi sebagian sistem pompa, dan berbagai pekerjaan rehabilitasi ringan lainnya.

Proyek ini berkoordinasi erat dengan tim perencanaan rekonstruksi drainase dan pencegahan banjir oleh Pemerintah Jepang. Proyek ini juga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin pemeliharaan dan kelangsungan pakai perangkat-perangkat keras yang telah dipasang, dan juga akan terus memberikan dukungan teknis pasca penyelesaian fase konstruksi.

3. Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur

Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (*Infrastructure Reconstruction Financing Facility*-IRFF) merupakan salah satu proyek yang didanai bersama dengan BRR yang menyediakan pendanaan berbagai proyek infrastuktur penting yang teridentifikasi melalui Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP).

IRFF akan meningkatkan fleksibilitas BRR untuk mendanai berbagai aktivitas infrastruktur, sehingga memungkinkan pendanaan proyek-proyek yang telah siap. Proyek ini menargetkan kebutuhan infrastruktur di tingkat kabupaten dan provinsi yang teridentifikasi melalui kerangka kerja IREP. Seperti halnya IREP, IRFF menitikberatkan pada peningkatan kemampuan pemerintah lokal dan provinsi dengan cara menentukan bersama sumber pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur yang sudah teridentifikasi. Kedua proyek (IREP dan IRFF) berupaya unutk berkontribusi pada strategi keluar BRR atas keterlibatan pemerintah daerah secara progresif hingga pada akhirnya menyerahkan segala tanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kepada mereka.

4. Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang

Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang ditujukan untuk memelihara kondisi jalan dari Lamno ke Calang untuk kurang lebih selama delapan bulan, selagi pekerjaan rehabilitasi permanen dilaksanakan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menjamin akses daratan yang tidak terganggu ke berbagai wilayah yang terkena dampak tsunami di kawasan pantai barat Aceh, untuk memperlancar proses rekonstruksi dan mempromosikan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di Aceh.

Pembangunan daerah di antara Lamno-Calang terus mengalami ketertinggalan dikarenakan kondisi jalan yang tetap bermasalah dan kadang kala tidak bisa digunakan untuk lalu lintas. Truk yang bermuatan lebih dan pemeliharaan jalan yang kurang memadai berdampak pada kondisi

perjalanan yang sangat buruk khususnya pada musim hujan.

Proyek ini menyediakan layanan pemeliharaan jalan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi jalan tersebut dapat digunakan untuk suatu periode selama delapan bulan. Setelah ini diharapkan lebih banyak pekerjaan jalan permanen dilakukan melalui USAID untuk bagian-bagian jalan yang sesuai dengan disain USAID; sementara itu direncanakan untuk bagian-bagian lainnya dari jalan tersebut akan ditingkatkan menjadi jalan kabupaten dalam proyek terpisah.

4.2.1.3 Pembangunan Kembali Tata Kelola

1. Bantuan Teknis bagi BRR

Program Bantuan Teknis kepada BRR mendukung lembaga tersebut untuk melaksanakan mandatnya secara efisien dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi dalam proses pemulihan melalui pengadaan bantuan teknis dan jasa-jasa strategis.

Proyek ini membantu BRR untuk merekrut konsultan dan perusahaan dengan keterampilan dan keahlian yang terbaik yang ada di pasar nasional maupun internasional. Bantuan proyek terdiri atas (i) perekrutan konsultan, (ii) pengadaan jasa-jasa penting bagi operasional BRR, dan (iii) peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi yang aktif dari semua pemangku kepentingan.

2. Proyek Rekonstruksi Berbasis Sumber Daya Lokal

Proyek ini membangun kapasitas pemerintah dan para kontraktor daerah untuk merekonstruksi dan memelihara jalan dengan metode yang sederhana. Proyek ini merehabilitasi jalan tingkat kabupaten di Aceh, dengan menggunakan sumber daya setempat, menciptakan peluang pekerjaan jangka pendek dan jangka panjang.

Proyek ini melatih pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola rekonstruksi dan memelihara jalan di tingkat kabupaten dan membantu kontraktor kecil untuk dapat membangun jalan dengan memakai metode berbasis lokal dan tepat guna. Penggunaan tenaga kerja lokal dan teknologi yang sederhana akan memampukan kontraktor untuk bersaing dalam pekerjaan konstruksi jalan dan pemeliharaannya selama proses rekonstruksi dan seterusnya. Proyek ini memberikan peluang kerja jangka pendek untuk perbaikan jalan serta peluang bekerja dengan jangka lebih panjang untuk pemeliharaan jalan. Proyek ini juga membutuhkan keterlibatan kuat para pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

4.2.1.4 Proyek Pengelolaan Lingkungan yang Berkesinambungan

1. Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup

Proyek ini akan melindungi ekosistem hutan Leuser dan Ulu Masen dari penebangan hutan secara ilegal. Area seluas 3,3 juta hektar merupakan kawasan hutan yang berdekatan dan terbesar di Asia Tenggara dengan *biodiversitas* yang sangat kaya, termasuk diantaranya harimau, gajah, badak

dan orang utan. Perlindungan yang baik atas hutan-hutan ini akan memastikan penyediaan pasokan air yang berkelanjutan bagi 60% dari populasi Aceh, pencegahan banjir dan erosi.

Proyek ini menanggapi berbagai tantangan terkini atas pasokan dan permintaan kayu untuk upaya rekonstruksi. Proyek ini mengupayakan suatu keseimbangan yang layak antara upaya perlindungan hutan dan penyediaan berbagai manfaat ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Upaya perlindungan berlandaskan pada suatu kerangka kerja dari para pemangku kepentingan pemerintahan, sistem pengawasan dan perlindungan hutan, dan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas lembaga pemerintah untuk pengelolaan hutan dan kawasan konservasi. Pelestarian lingkungan hidup dalam rekonstruksi di Aceh akan diupayakan lebih lanjut melalui pemberian dukungan terhadap perencanaan ruang, kampanye-kampanye kesadaran lingkungan, dan berbagai aktivitas rehabilitasi berbasis komunitas.

Dengan menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah provinsi, BRR dan LSM setempat, proyek ini bertujuan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam agenda kerjanya. Proyek ini mendirikan Pusat Informasi Perkayuan bagi lembaga-lembaga rekonstruksi, melakukan berbagai aktivitas pengawasan hutan secara berkala, dan pelatihan untuk para pengawas hutan yang berasal dari komunitas masyarakat di sekitar hutan. Proyek ini juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan

pelestarian lingkungan hidup dalam proses rancangan tata ruang yang sedang berjalan di Aceh. Akhirnya, dengan kerjasama erat dengan para pemuka adat dan masyarakat, pengembangan aktivitas-aktivitas kehutanan agro dan penanaman puluhan ribu bibit dapat dilakukan.

4.3 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Operasionalisasi Pelaksanaan Proyek MDTFANS

Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan proyek yang dibentuk oleh MDTFANS, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh (BRR) untuk memantau perkembangan dari kegiatan rekonstruksi di Aceh baik dalam perkembangan proses dan juga audit pendanaan kemudian melaporkannya pada pemerintah pusat. BRR dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada Bulan April 2005 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005. Selain dari tanggung jawabnya sebagai salah satu ketua MDTFANS bersama *World Bank* dan Uni Eropa, BRR juga bertindak sebagai badan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan beberapa proyek MDTFANS di lapangan bersama beberapa lembaga lainnya dari Pemerintah Indonesia (www.e-aceheyes.org).

Dari sembilan proyek yang dibentuk oleh MDTFANS untuk upaya rekonstruksi di Aceh, Pemerintah Indonesia berpartisipasi sebagai badan pelaksana di lapangan melalui BRR, Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perumahan dan Departemen Dalam Negeri. BRR merupakan badan yang paling banyak memiliki peran dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Tercatat 2 proyek MDTFANS yang dilaksanakan oleh BRR diantaranya adalah Bantuan Teknis untuk BRR dan Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF).

Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui BRR juga menyalurkan bantuan dana untuk membiayai bersama 2 program dan 1 proyek MDTFANS dengan rincian US$ 5 juta untuk Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (REKOMPAK), US$ 191 juta untuk Program Pemberdayaan Infrastruktur (IREP), dan bantuan untuk Program Percepatan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) adalah sebesar US$ 14,6 juta. Total dana yang diberikan untuk pembiayaan bersama dengan MDTFANS adalah sebesar US$ 210,6 juta yang termasuk pada APBN Indonesia (www.multidonorfund.org/documents).

Pemerintah Indonesia juga mendukung secara penuh prinsip pokok yang menjadi asas dari MDTFANS dalam menjalankan tugasnya dimana salah satunya yaitu "adanya keterbukaan dan transparansi penuh dalam setiap proses operasional MDTFANS". Dalam hal ini, pemerintah melalui BRR memiliki suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk memantau apabila ada berbagai penyimpangan mengenai penggunaan dana rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh yang bernama Satuan Anti-Korupsi (SAK). Badan ini menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsinya. Di antaranya mencakup lembaga swadaya masyarakat seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), *Transparency International Indonesia* (TII), *Indonesia Corruption Watch* (ICW) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama yang dibangun bukan saja untuk menindaklanjuti kejadian atau

dugaan korupsi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BRR, melainkan juga dalam hal pendidikan dan sosialisasi informasi sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi (www.e-aceheyes/SAK.htm).

Dalam membantu memudahkan pemberian bantuan dana dari luar negeri untuk upaya pemulihan Aceh, pemerintah melalui Menteri Keuangan sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-24/MK.06/2005 tanggal 18 Januari 2005 telah membuka 4 (empat) rekening di Bank Indonesia untuk menampung hibah dari luar negeri dan masyarakat dalam negeri dalam mata uang Rupiah (No. Rek 510.000.272), Dollar Amerika Serikat (No. Rek 602.074.411), Japanese Yen (No. Rek. 602.075.111) dan Euro (No. Rek. 602.076.991). Pembukaan rekening ini memudahkan penyaluran dana dari MDTFANS untuk pembiayaan tujuh belas program atau proyek rekonstruksi di Aceh pasca bencana tsunami (www.humanitarianinfo.org/sumatra/reference/Buku-11_Pendanaan.pdf).

4.4 Hasil yang Dicapai dari Pelaksanaan Proyek MDTFANS

Setelah pembentukannya pada bulan April 2005, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa MDTFANS mempunyai portofolio proyek yang tengah diterapkan di empat bidang rekonstruksi: pemulihan kemasyarakatan, rekonstruksi infrastruktur skala besar dan transportasi, pembangunan kembali tata kelola dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang seluruhnya bernilai US$ 482 juta. Selain proyek-proyek yang tengah berlangsung, MDTFANS pada tahun 2007 telah menyetujui persiapan dua proyek baru di bidang pengurangan resiko bencana dan pemulihan ekonomi, dengan nilai total US$ 59,9 juta. Proyek-proyek ini sekarang sedang dalam tahap persiapan.

Rekonstruksi kemasyarakatan merupakan sektor yang menunjukkan kemajuan terbesar. Faktor yang menentukan keberhasilan proyek-proyek ini adalah karena menggunakan mekanisme penyampaian yang sudah ada, dan pada saat masyarakat menerima dana, melalui perencanaan yang matang implementasi biasanya terjadi dengan cepat. Rekonstruksi di bidang lain, seperti pengembangan investasi infrastruktur skala besar atau pembangunan kapasitas untuk pemerintah lokal atau organisasi masyarakat sipil memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperlihatkan hasil. Hal ini bisa disimpulkan berbagai faktor intrinsik yang terjadi di dalam proses masa pemulihan, seperti kekurangan sumber daya manusia atau masalah koordinasi. Akan tetapi, sisi baik dari proyek-proyek tersebut adalah adanya keterlibatan mendalam dari semua pemangku kepentingan, sehingga walaupun memakan waktu, telah memperlihatkan arah menuju kepemilikan yang kuat atas aset yang direkonstruksi oleh masyarakat dan pemerintah lokal.

4.4.1 Pemulihan Kemasyarakatan

Pada sektor ini, MDTFANS membentuk dua proyek yang ditujukan untuk rekonstruksi rumah dan pemulihan masyarakat, yakni proyek rekonstruksi administrasi pertanahan Aceh dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan pemukiman berbasis komunitas (REKOMPAK) serta telah mengalokasikan US$ 222 juta atau 45% dari pendanaan untuk sektor ini. MDTFANS telah memberikan kontribusi terhadap pemetaan kembali lahan masyarakat serta pembuatan sertifikat lahan yang baru melalui proyek rekonstruksi administrasi pertanahan dimana sampai dengan Bulan September 2007, proyek ini telah berhasil memberikan 104.429 buah sertifikat

tanah kepada masyarakat Aceh yang lahannya menjadi korban dari bencana tsunami. Berdasarkan laporan perkembangan IV dari MDTFANS, setelah dua tahun pelaksanaan proyek ini, terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah sertifikat yang telah diberikan pada masyarakat Aceh dimana terjadi peningkatan pada tahun 2007 sebanyak 82.287 sertifikat dari tahun sebelumnya. Pada infrastruktur perumahan, sampai dengan Bulan September 2007, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan pemukiman berbasis komunitas (REKOMPAK) telah berhasil memperbaiki rumah sebanyak 9.780 unit rumah yang direkonstruksi dan sebanyak 7.616 unit rumah telah selesai direhabilitasi dalam kurun waktu dua tahun (Laporan Perkembangan IV MDTFANS, 2007). Bantuan dana yang diberikan oleh MDTFANS melalui kedua proyeknya ini telah membantu masyarakat Aceh untuk bisa mendapatkan kembali hak kepemilikan atas tanahnya serta telah kembali menempati rumah-rumah mereka yang hancur akibat bencana tsunami.

1. Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan Aceh

Proyek ini menerima hibah dari MDTFANS sebesar 28,5 juta Dollar Amerika yang dilaksanakan sejak Bulan Juni tahun 2005 dan direncanakan akan selesai pada Bulan Desember tahun 2008. Pelaksanaan di lapangan untuk proyek ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Proyek ini telah memperkuat kapasitas manajemen pertanahan lokal, antara lain dengan melatih 680 fasilitator LSM dan juga 480 staff BPN baru. Tiga kantor pertanahan telah dibangun atau sedang dalam tahap akhir pembangunan. Lebih lanjut lagi proyek memiliki dampak positif seperti:

- Membantu memulai pemetaan lahan masyarakat dan memutuskan hak kepemilikan lahan berdasarkan kegiatan pedesaan/ masyarakat
- Kepemilikan lahan oleh kaum perempuan melalui sertifikat bersama
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan pada tingkat lokal
- Mencegah penyerobotan lahan dan spekulasi
- Memperkenalkan sistem registrasi lahan terkomputerisasi.

Sampai dengan Bulan September 2007, proyek ini telah berhasil memberikan sertifikat hak milik tanah kepada 104.429 pemilik, sementara 118.935 hak kepemilikan telah terdaftar di buku pertanahan. Proyek ini juga mempunyai dampak yang lebih luas dalam mencegah perampasan dan spekulasi tanah serta mengakomodasi masalah hak waris dan gender dengan menerbitkan surat tanah bersama (10% dari sertifikat yang didistribusikan saat ini). Pendekatan pemetaan tanah yang didukung dengan penerapan petunjuk umum di seluruh Aceh, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat daerah. Selain itu, bidang-bidang tanah yang telah disurvey oleh BPN pada tahun 2007 mencapai 210.591 bidang tanah dan yang telah siap untuk dipublikasikan pada masyarakat sebanyak 157.880 bidang tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pencapaian Proyek Rekonstruksi Adm. Pertanahan Aceh

Hasil	Pencapaian	
	2006	2007
Sertifikat tanah yang telah diberikan kepada pemilik	6.580	104.429
Sertifikat tanah yang telah dicatat pada buku tanah	15.562	118.935
Bidang-bidang tanah yang siap disampaikan ke publik	71.675	157.880
Bidang-bidang tanah yang telah disurvey secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)	119.761	210.591
Pemetaan tanah masyarakat	123.466	211.650

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007
Ket : Data telah diolah oleh peneliti

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK)

Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2005 dan akan berakhir pada bulan Februari 2009. Dengan nilai hibah sebesar US$ 85 juta, pelaksanaan proyek ini dikerjakan oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Semua kegiatan pemulihan masyarakat dikelola dan dijalankan oleh masyarakat sendiri, dengan dukungan lebih dari 13.000 jaringan fasilitator lokal yang kuat. Melalui REKOMPAK, masyarakat di Aceh telah membangun 4.434 rumah baru dan merehabilitasi 5.195 rumah dengan menggunakan mekanisme pengawasan kualitas yang ketat untuk menjamin keselamatan dari gempa bumi.

Hampir semua rumah yang telah selesai sudah dihuni. Sudah 100% pemilik rumah telah menghuni kembali rumah-rumah mereka yang telah direhabilitasi, sementara tingkat hunian untuk rumah-rumah baru lebih rendah, sekitar 82%. Hal ini dapat dibandingkan dengan rata-rata tingkat hunian rumah

baru seperti rumah UN-Habitat (82%) yang dibangun dengan pendekatan yang serupa. Proyek Perumahan Aceh akan menganalisis penyebab lebih rendahnya tingkat hunian untuk rumah yang baru dan langkah yang harus diambil pada saat penilaian dampak yang akan dilakukan pada awal 2008. Sementara itu tingkat hunian di awal 2007 bahkan lebih rendah (72%), sebuah survei kepuasan dari 1.300 penerima rumah pertama, yang dilakukan pada saat itu, menunjukkan bahwa 90% dari penerima manfaat puas atau sangat puas dengan proses berbasis masyarakat dan hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa proyek yang dibentuk oleh MDTFANS mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Aceh yang secara otomatis menunjukkan pula adanya keberhasilan dari MDTFANS dalam membantu rekonstruksi di Aceh. Pencapaian dari proyek ini dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Pencapaian Proyek RE-KOMPAK

Hasil	Pencapaian	
	2006	2007
Rumah yang direkonstruksi		
• Selesai	5.346 unit	4,434 unit
• Dalam konstruksi		3,410 unit
Rumah yang direhabilitasi		
• Selesai	2.424 unit	5,192 unit
• Dalam konstruksi		1,725 unit

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007
Ket : Data telah diolah oleh peneliti

4.4.2 Pemulihan Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi

Portofolio MDTFANS telah menjawab berbagai kesenjangan kritis pada sektor infrastruktur dan transportasi akibat bencana tsunami di Aceh.

Dukungan terhadap berbagai kebutuhan darurat dan rekonstruksi jangka panjang melalui proyek pengangkutan laut dan logistik; proyek pencegahan banjir untuk Banda Aceh; fasilitas pendanaan rekonstruksi infrastruktur (IRFF) dan proyek pemeliharaan jalan Lamno-Calang telah membantu mengurangi beberapa hambatan dalam proses rekonstruksi. Keempat proyek yang dibentuk dan didanai oleh MDTFANS tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terciptanya fasilitas infrastruktur baik yang mendukung proses rekonstruksi Aceh secara keseluruhan ataupun yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Melalui proyek pengangkutan laaut dan logistik, berdasarkan laporan perkembangan IV MDTFANS sampai dengan tahun 2007, tercatat 98.185 metrik ton material konstruksi baik yang didanai oleh MDTFANS sendiri ataupun material dari pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang sama telah disalurkan ke Aceh melalui jalur laut pada saat tidak tersedianya angkutan komersil. Banda Aceh merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana banjir. Tsunami yang menghantam wilayah ini telah membuat sebagian besar infrastruktur pencegahan banjir yang ada di sana mengalami kerusakan yang parah. Melalui proyek pencegahan banjir untuk Banda Aceh, MDTFANS telah memasang kembali 11 keran banjir. Sedangkan perbaikan pada sistem drainasi sampai dengan tahun 2007 masih dalam proses pengerjaan yang meliputi pembangunan kembali rumah pompa dan klep banjir (lihat tabel 4.5). Sementara itu, fasilitas pendanaan rekonstruksi infrastruktur dibentuk untuk memudahkan proses rekonstruksi infrastrukttur di Aceh dengan cara tender. Hal ini dapat memudahkan percepatan pengerjaan dari

pembangunan kembali infrastruktur di Aceh. Proyek pemeliharaan jalan Lamno-Calang merupakan salah satu upaya lain dari MDTFANS dalam mendukung proses rekonstruksi infrastruktur dan transportasi di Aceh dimana jalan raya Lamno-Calang merupakan jalan utama yang menghubungakan Banda Aceh dan Aceh Tenggara. Jalan ini merupakan jalur pengangkutan material untuk rekonstruksi di beberapa kawasan yang terkena dampak tsunami. Melalui proyek ini, MDTFANS telah menyalurkan dana yang telah berhasil memelihara sepanjang 103 km jalan serta perbaikan lainnya yang mendukung pemeliharaan jalan Lamno-Calang. Proyek-proyek yang dibentuk dan didanai oleh MDTFANS ini telah membantu kelancaran pembangunan infrastruktur Aceh baik yang dilakukan oleh badan-badan pelaksana MDTFANS ataupun pihak lain yang memiliki tujuan yang sama untuk segera memulihkan kondisi Aceh dalam sektor infrastruktur dan transportasi.

1. Proyek Pengangkutan Laut dan Logistik

Proyek ini dilaksanakan oleh *World Food Program* (WFP) dengan nilai hibah mencapai US$ 24.7 juta. Pelabuhan tujuan utama untuk pengiriman barang selama ini adalah Sinabang di Simeulue, Calang dan Pulo Aceh, yang tiga di antaranya adalah tujuan kepulauan. Transportasi barang ke pantai-pantai terpencil lain di Simeulue adalah manfaat lain dari proyek ini, karena banyak lokasi yang tidak bisa dicapai dengan truk besar. WFP pada saat ini sedang melakukan perancangan ulang proyek. Proyek akan terus memberikan dukungan logistik dan juga memfasilitasi sebanyak mungkin pelatihan dalam kelas dan lapangan yang diperlukan bagi otoritas pelabuhan. Kegiatan ini

sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pelabuhan yang baru akan dilakukan secara berkelanjutan pengoperasian alat-alat berat secara aman. Sampai dengan Bulan September 2007, proyek ini telah berhasil mengangkut 98.185 metrik ton bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur baik yang didanai oleh MDTFANS sendiri ataupun badan-badan lain yang memiliki keperluan yang sama. Secara lebih rinci pencapaian dari proyek ini bisa dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pencapaian Proyek Pengangkutan Laut dan Logistik

Hasil	Pencapaian September 2007
Bahan bangunan yang dikirim	98.185 metrik ton
Jumlah lembaga yang menggunakan layanan pengiriman :	82 users
• Badan-badan dari Palang Merah Internasional	51%
• Badan-badan PBB	25%
• LSM lain/Badan rekonstruksi	20%
• Pemerintah	4%
Pengiriman kargo yang difasilitasi melalui layanan logistik sejak januari 2007	Sekitar 50.000 mt

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

2. Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh

Proyek ini dimulai pada Bulan April 2006 yang memiliki nilai hibah sebesar 4.5 juta Dollar Amerika. Pelaksanaan dari proyek ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang bernama Muslim Aid. Pada awal tahun 2006, proyek memasang 11 keran banjir untuk mencegah banjir pasang dan mengeringkan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap banjir di Banda Aceh. Hal ini telah memberikan kepuasan kepada masyarakat karena banjir tidak terjadi setelah hujan dan saat pasang tinggi. Lebih lanjut lagi, rencana perancangan

telah selesai dan proses tender telah dimulai untuk pembangunan tiga rumah pompa dan pemasangan klep banjir. Pembangunan dan perbaikan 4.400 meter gorong-gorong drainase dan perbaikan 12.300 meter gorong-gorong drainase sekunder telah dimulai. Pekerjaan umum utama diharapkan untuk selesai pada tahun 2008.

Tabel 4.5
Pencapaian Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh

Hasil	Target	Pencapaian
Penurunan banjir langsung melalui keran banjir	11	11
Sistem drainasi yang dibangun kembali : - Rumah pompa - Klep banjir - Drainase (pembangunan/perbaikan)	 3 rumah pompa Semua area banjir 4,4 km/12,3 km	Sampai September 2007 pekerjaan baru dimulai dan sekarang sedang dalam pengerjaan

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

Keterangan :

Pemulihan sistem pencegahan banjir melalui pembangunan kembali rumah pompa, klep banjir dan drainase baru dilaksanakan pada tahun 2007 sehingga sampai dengan Bulan September 2007, belum mengindikasikan bahwa proyek pada ketiga sistem ini telah selesai. Target yang dicanangkan oleh MDTFANS pada ketiga sistem penanggulangan banjir ini adalah 3 buah rumah pompa, pemasangan klep banjir di semua area yang rawan terkena banjir di Banda Aceh serta pembangunan 4,4 km serta perbaikan 12,3 km sistem drainase di Banda Aceh yang kesemuanya dijadwalkan akan selesai pada Bulan Juni 2008. Hanya 11 keran banjir yang telah selesai dipasang untuk pencegahan banjir di wilayah Banda Aceh sampai dengan Bulan september 2007.

3. Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)

Proyek ini telah memanfaatkan rencana investasi lokal seperti strategi Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) dalam mengembangkan jadwal proyek yang ditinjau secara berkala. Perlindungan terhadap lingkungan dipastikan terjadi dengan menerapkan penilaian dampak lingkungan dan rencana pengelolaan terkait. Hingga saat ini kontrak senilai $170 juta telah diberikan atau sedang dalam proses pemberian atau dalam proses tender. Sampai dengan tahun 2007, sebanyak 6 buah kontrak pada perbaikan jalan nasional telah selesai dilaksanakan sebesar 25,7 juta Dollar Amerika yang akan memperbaiki jalan sepanjang 184,5 km. Nilai kontrak yang sudah siap untuk diberikan pada 3 buah sistem air, 3 pelabuhan dan jalan sepanjang 43,4 km adalah sebesar 82,2 juta Dollar Amerika. Sedangkan nilai kontrak yang masih dalam proses tender adalah sebesar 63,5 juta Dollar Amerika yang terdiri dari 10 tender yang akan merekonstruksi jalan provinsi atau kabupaten sepanjang 340,1 km dan jalan nasional sepanjang 98,3 km. Secara lebih rinci, pencapaian dari proyek ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Pencapaian Sementara Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur

Hasil	Sampai September 2007
Dalam pembangunan:	
Jalan nasional (jumlah kontrak/nilai kontrak/km jalan)	6/US$25.7 juta/184.5 km
Jumlah (nilai) kontrak yang sudah siap diberikan:	14 (US$82.2 juta)
Sistem air	3 sistem
Pelabuhan	3 pelabuhan
Jalan	43.4 km
Jumlah (nilai) kontrak dalam proses tender:	10 (US$63.5 juta)
Jalan provinsi/kabupaten	340.1 km
Jalan nasional	98.3 km

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

4. Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang

Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang memelihara 103 km jalan dari Lamno di Banda Aceh sampai ke Calang yang berada di Aceh Tenggara. Pelaksanaan proyek ini dimulai dari Oktober 2006 sampai Desember 2007, dengan nilai hibah sebesar 1,5 juta Dollar Amerika dan dilaksanakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP).

Pada tahun 2006, jalan antara Lamno-Calang berada dalam kondisi kritis karena beban truk yang kelebihan dan pemeliharaan yang buruk. Hal ini menyebakan jalan terkadang tidak dapat dilalui, terutama pada musim penghujan. Proyek ini memberikan pemeliharan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa jalan dapat dilalui selama periode delapan bulan. Pembangunan jalan permanen akan dilaksanakan melalui USAID dimana USAID akan mengambil alih proyek ini pada Oktober 2007. Sampai dengan bulan September 2007 perbaikan darurat sebagian besar telah selesai sehingga proyek diharapkan dapat menyerahkan tanggungjawab ke kontraktor USAID pada bulan Oktober 2007. Hasil yang dicapai dari proyek ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Pencapaian Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang

Hasil	Pencapaian
Jalan yang dikeraskan	52 km
Pemeliharaan bahu jalan	103 km
Penggalian selokan	16 km
Dek jembatan yang diperbaiki	18 unit
Jembatan bailey yang terpasang	2 unit dan 3 sedang berlangsung
Lapangan kerja pendek yang diciptakan	1.900 hari

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

4.4.3 Pembangunan Kembali Tata Kelola

Pada tahun 2006, sebuah tinjauan rinci kapasitas manajemen keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Aceh dilakukan melalui kolaborasi diantara berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas. Nilai rata-rata kabupaten sekitar 41% dimana penelitian ini juga menemukan perbedaan kapasitas yang mencolok diantara masing-masing kabupaten (Aceh Utara mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 69% dan Aceh Jaya paling rendah yaitu sebesar 15%). Peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan daerah akan menjadi fokus dari proyek-proyek MDTFANS pada sektor ini. MDTFANS telah mengalokasikan dana sebesar US$ 52 juta untuk sektor ini, atau sekitar 11% dari pengalokasian dana keseluruhan. Melalui bantuan teknis bagi BRR yang dimulai sejak tahun 2005, MDTFANS telah mendanai pembentukan Unit Relokasi BRR yang telah berhasil 7.258 kepala keluarga ke daerah yang lebih baik. Selain itu, MDTFANS juga telah memantau kualitas proyek yang akan dilakukan oleh BRR serta peninjauan mengenai proposal-proposal proyek tersebut. Melalui bantuan teknis ini, MDTFANS berupaya penuh untuk meningkatkan kapasitas dari lembaga-lembaga yang *concern* terhadap rekonstruksi Aceh agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Proyek rekonstruksi berbasis sumberdaya lokal menitik beratkan pada pembangunan jalan di beberapa wilayah di Aceh. Dengan mengandalkan sumberdaya masyarakat kabupaten setempat, pemeliharaan dan perbaikan jalan telah mencapai hasil 43 jalan kabupaten yang telah selesai diperbaiki dan 48 masih dalam proses pengerjaan (Laporan Perkembangan IV MDTFANS, September

2007). Melalui proyek ini, selain membantu perbaikan jalan raya yang ada di Aceh, MDTFANS juga telah menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat setempat guna memperbaiki taraf hidup masyarakat di sana.

1. Bantuan Teknis Bagi BRR

Bantuan teknis bagi BRR telah dimulai sejak Bulan Juli 2005, dengan badan mitra UNDP dan jumlah hibah sebesar 14,7 juta Dollar Amerika, pelaksanaan dari bantuan teknis ini dilakukan oleh BRR sendiri. Sampai dengan saat ini, proyek telah merekrut 57 ahli teknis untuk masa 463 bulan kerja dan bertugas membantu berbagai departemen di BRR agar dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif di berbagai bidang seperti perumahan, infrastruktur (perencanaan perkotaan, pembangunan pesisir, pelabuhan, irigasi, drainase, dll.), pengelolaan lingkungan dan perkayuan, perencanaan tata ruang, dan kesehatan serta koordinasi keseluruhan dan tata pemerintahan yang baik. Layanan-layanan terkait ini penting untuk membantu menentukan standar kualitas proses rekonstruksi dan pelaksanaan, baik bagi program pemerintah maupun program rekonstruksi yang lebih luas.

Layanan operasional seperti bantuan hukum, bantuan untuk mengelola SDM dan instalasi telah dikontrakkan melalui perusahaan eksternal. Sebuah perusahaan pengelolaan sumber daya manusia telah dikontrak untuk mendukung Departemen SDM BRR. Tim ini telah mengembangkan prosedur standar untuk pengelolaan SDM dan berbagai instrumen yang berkaitan dengan SDM. Pelayanan ini juga mendukung keperluan perekrutan BRR dalam menyaring lebih dari 2.000 kandidat. Lebih lanjut lagi, Unit Relokasi BRR

yang membantu keluarga-keluarga Aceh untuk direlokasi ke wilayah yang lebih layak, dibentuk dengan pendanaan ini.

Tabel 4.8
Pencapaian Bantuan Teknis bagi BRR

Hasil-hasil sejak Januari 2007	Pencapaian
Bantuan untuk pedoman, strategi dan pengembangan kebijakan	151
Proposal proyek yang ditinjau	123 buah
Proyek BRR yang dimonitor kualitasnya	192 buah
Keluarga yang direlokasi	7.258 kepala keluarga

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

2. Proyek Rekonstruksi Berbasis Sumberdaya Lokal

Proyek Rekonstruksi Berbasis Sumber Daya Lokal ini dilaksanakan oleh *International Labour Organization* (ILO) dengan jumlah hibah mencapai 6,4 juta Dollar Amerika. Proyek ini telah melatih 77 staf pemerintahan (6 perempuan) dan 166 manajer dan staf teknis dari kontraktor lokal (1 perempuan). Sementara memberikan bantuan secara fisik dalam membangun kembali jalan-jalan kabupaten, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk melatih pemerintah dan kontraktor lokal dalam hal metode konstruksi jalan yang menciptakan lapangan pekerjaan lokal dengan mengandalkan kontraktor lokal dan pendekatan teknologi sederhana. Proyek ini telah berhasil melibatkan pejabat pemerintah dan masyarakat di kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Bireuen dalam membangun kapasitas mereka untuk menggunakan metode-metode berbasiskan sumber daya lokal. Hingga kini, proyek ini juga menciptakan lebih dari 100.000 hari kerja untuk pekerja lokal di Aceh. Tingkat perempuan yang dipekerjakan sebesar 16%. Proyek ini telah merespon dengan

menetapkan keharusan untuk memperkerjakan perempuan dalam kontrak konstruksi.

Tabel 4.9
Pencapaian Proyek Rekonstruksi Berbasis Sumberdaya Lokal

Hasil	Pencapaian hingga 2007
Jalan kabupaten yang telah selesai dibangun kembali	43 jalan
Jalan kabupaten yang masih dibangun	48 jalan
Jumlah staff pemerintah kabupaten:	
- Insinyur dan pengawas	67 orang
- Staff yang dilatih dalam pengelolaan infrastruktur	43 orang
- % perempuan	16.3%
Jumlah kontraktor lokal yang dilatih	
- Insinyur dan supervisor	95 orang
- Manajer yang dilatih mengenai prosedur tender	71 orang

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

4.4.4 Pengelolaan Lingkungan yang Berkesinambungan

Sumber daya alam yang berharga di Aceh hanya dapat dilindungi dengan mengutamakan pertimbangan lingkungan hidup dalam rekonstruksi. Sesuai dengan rekomendasi dari *Coordination Forum for Aceh and Nias* 3 (CFAN 3) pada April 2007, MDTFANS mendukung keberlangsungan lingkungan hidup melalui (a) dukungan terhadap pendekatan strategis kepada pengelolaan lingkungan hidup; (b) kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup untuk menghindari pengrusakan lingkungan hidup; dan (c) penciptaan sumber penghasilan alternatif untuk mencegah degradasi sumber daya alam lebih lanjut.

MDTFANS menyediakan dukungan untuk dua bidang strategis perlindungan lingkungan hidup yakni melalui pengelolaan limbah dan pengelolaan hutan lestari. Dengan dana sebesar US$ 41.9 juta (8% dari dana yang dialokasikan), MDTFANS merupakan satu-satunya kontributor terbesar

untuk kepentingan lingkungan hidup dalam rekonstruksi. Dalam pengelolaan limbah, pemerintah daerah dimampukan untuk menerapkan pengumpulan limbah dan layanan pembuangan, di saat yang sama penciptaan mata pencaharian dalam daur ulang diharapkan dapat membuat pengelolaan limbah lebih efisien dan menyediakan penghasilan tambahan. Proyek hutan Aceh dan lingkungan hidup merupakan upaya MDTFANS dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan. Proyek ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam mendukung pelestarian hutan di Aceh dimana kampanye yang dilakukan melibatkan kelompok lingkungan sekolah yang terdiri dari para guru dan siswa. Proyek ini belum menunjukkan pencapaian yang signifikan mengingat proyek ini memang ditujukan untuk prospek jangka panjang sampai dengan tahun 2010.

1. Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup

Proyek ini akan berlangsung sampai dengan Bulan Juni tahun 2010 yang dilaksanakan oleh *Leuser International* Foundation (LIF). Nilai hibah yang disalurkan untuk proyek ini mencapai 17,5 juta Dollar Amerika. Dengan menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah propinsi, BRR dan LSM setempat, proyek ini bertujuan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam agenda kerjanya. Proyek ini mendirikan Pusat Informasi Perkayuan bagi lembaga-lembaga rekonstruksi, melakukan berbagai aktivitas pengawasan hutan secara berkala, dan pelatihan untuk para pengawas hutan yang berasal dari komunitas masyarakat di sekitar hutan. Proyek ini juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk juga memperhatikan hal-hal

yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dalam proses rancangan tata ruang yang sedang berjalan di Aceh. Akhirnya, dengan kerjasama erat dengan para pemuka adat dan masyarakat, pengembangan aktivitas-aktivitas kehutanan agro dan penanaman puluhan ribu bibit dapat dilakukan.

Pada tahun 2006, proyek ini telah mengembangkan *baseline* untuk status ekosistem Leuser dan Ulu Masen dimana hutan di Ekosistem Leuser dan Ulu Masen adalah hutan yang berdampingan terbesar di Asia Tenggara. Hutan-hutan ini menyediakan air untuk 60% dari populasi Aceh dan membantu melindungi masyarakat dari banjir yang disebabkan oleh hujan. Pemerintah Aceh yang baru terpilih telah mengakui pentingnya untuk melindungi hutan-hutan ini dengan mengeluarkan moratorium (penghentian sementara) terhadap pembalakan sampai kerangka kerja kebijakan dan pengelolaan yang layak diterapkan.

Program Hutan dan Lingkungan Aceh *(The Aceh Forest and Environment Project* (AFEP) bekerja sama dengan pemangku kepentingan pada setiap tingkat untuk meningkatkan perlindungan hutan. Proyek empat tahun ini mendukung pengembangan kerangka kerja pengelolaan hutan berbagai pemangku kepentingan, proses perencanaan tata ruang, kampanye kesadaran bagi pemimpin adat, guru, murid dan masyarakat luas, reboisasi dan masyarakat pembibitan, dan penilaian kesempatan untuk menggunakan perdagangan karbon sebagai mekanisme pendanaan untuk konservasi.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan telah menanami kembali 670 ha hutan dengan bantuan proyek, dengan total target 5.000 ha pada akhir proyek.

Kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat menyediakan kesempatan untuk menentukan batas-batas hutan dan lahan produktif, juga mendukung masyarakat dalam pengembangan mata pencarian alternatif.

Tabel 4.10
Pencapaian Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup sampai September 2007

Hasil	Target 2010	Pencapaian
Perencanaan tata ruang (tingkat masyarakat/tingkat kabupaten)	40 desa (10 mukim/7 kabupaten)	9 desa/1 kabupaten
Guru yang dilatih mengenai konservasi (guru perempuan dalam %)	500	281 (43%)
Kelompok lingkungan sekolah yang dibentuk (jumlah anggota)	500	4 kelompok (1.500 anggota)
Penjaga hutan pemerintah yang dilatih (jumlah perempuan)	1.000	1.0 (89)
Petugas konservasi/kehutanan yang dilatih (jumlah perempuan)		36 (2)
Pemantau masyarakat yang dilatih (jumlah perempuan)	15	138 (1)
Hutan yang di reboisasi (ha)	5000	670

Sumber : MDTFANS, Laporan Perkembangan IV – Desember 2007

4.5 Prospek Pembangunan Kembali Aceh Pasca Berakhirnya Masa Kerja MDTFANS

Pengalaman menunjukkan bahwa proses rekonstruksi setelah bencana skala besar seperti gempa bumi dan tsunami bisa berlangsung hingga sepuluh tahun. Sementara proyek rekonstruksi yang dicanangkan MDTFANS akan berakhir pada 2010, pemulihan masih akan harus berlanjut dan diselesaikan oleh Pemerintah Propinsi dan Daerah. Banyak kebutuhan yang masih harus dipenuhi, akan tetapi akan ada dua masalah yang kini menjadi sangat penting, yakni mengelola transisi rencana rekonstruksi pada pemerintah nasional, propinsi dan lokal, dan memulai kembali perekonomian. Baik transisi maupun pengembangan perekonomian akan

sangat penting untuk tahap rekonstruksi selanjutnya, yang harus menerapkan keberlanjutan antara rekonstruksi dan pembangunan jangka yang lebih panjang di wilayah Aceh.

Di sisi lain, masa kerja BRR di Aceh yang akan berakhir pada April 2009 merupakan tantangan pertama yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun proyek rekonstruksi di Aceh masih tetap terpantau oleh MDTFANS sampai dengan tahun 2010, namun berakhirnya masa kerja dari BRR tetap merupakan suatu hal penting yang harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat dikabarkan akan membentuk sebuah badan pengganti sekaligus pelanjut, yakni Badan Koordinasi Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKKRR) Aceh. Badan ini kelak akan dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI. Menanggapi hal itu, Wakil Guberur Aceh, Muhammad Nazar, dalam suratnya tertanggal 24 Januari 2008 yang ditujukan kepada Mendagri telah memberikan koreksi terhadap rancangan peraturan presiden (ranperpres) yang akan menjadi dasar pembentukan BKKRR tersebut. Dalam suratnya bernomor 188.31/1679 yang ditujukan kepada Mendagri, Wakil Gubernur Aceh menegaskan, untuk menjamin kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, dipandang perlu dibentuk BKKRR Aceh yang berada di bawah kewenangan Gubernur Aceh (Serambi, edisi Februari 2008).

Merupakan sebuah pekerjaan rumah yang berat bagi Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk melanjutkan proyek rekonstruksi di Aceh tanpa adanya bantuan baik dari negara atau lembaga seperti MDTFANS terutama dalam penyediaan dana. Kehadiran MDTFANS dalam upaya pemulihan Aceh melalui

proses rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 memang begitu terasa manfaatnya. Berbagai perencanaan program dan proyek rekonstruksi di Aceh bisa dikoordinasikan dengan baik. Profesionalisme yang diberikan oleh MDTFANS memudahkan pula dalam hal analisa perkembangan proyek serta transparansi dari segala pembiayaan sangat mendukung bagi terciptanya suatu upaya pemulihan yang sehat dan bersih. Namun, meskipun MDTFANS akan mengakhiri masa kerjanya pada 2010 nanti, perencanaan serta prinsip-prinsip yang telah ditanamkan dalam upaya pemulihan Aceh sejak 2005 sampai 2008 telah membentuk suatu fondasi kuat yang bisa dikatakan sebagai sebuah investasi penting bagi terciptanya kualitas proses rekonstruksi di Aceh yang lebih baik.

Dengan adanya fondasi tersebut, maka prospek dari upaya rekonstruksi di Aceh setelah berakhirnya masa kerja MDTFANS dapat berjalan dengan baik. Hanya saja banyak hal yang harus dibenahi oleh pihak Indonesia terutama hal-hal yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi ketika MDTFANS masih melaksanakan tugasnya di Aceh.

Ada berbagai prioritas yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan upaya pembangunan jangka panjang di Aceh melalui proses rekonstruksi di sana. Diantaranya adalah harus ada upaya yang serius dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga fondasi kuat yang telah ditanamkan oleh MDTFANS dengan berbagai macam program pendukung tentunya seperti yang telah ditetapkan dalam rencana induk yang telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30

Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, memelihara perdamaian di Aceh adalah hal penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan pengembangan serta penjagaan investasi rekonstruksi. Perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, diikuti dengan Program Reintegrasi yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, pengembangan Undang-Undang Pemerintah Daerah Aceh dan pemilihan umum demokratis pertama di Aceh pada 2006 dan 2007 telah memberikan dasar bagi perdamaian dan stabilitas yang harus terus dijaga demi tercapainya pemulihan kondisi Aceh.